

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Aidha, Cut Nurul, Maftuchan, Ah, Hiteland, Maarten, van Teeffelen, Jasper, 2019, *How the Indonesia-Netherlands Tax treaty Enables Tax Avoidance : An Analysis of the treaty and Indonesian Court Decisions on Tax Disputes*, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen & Perkumpulan Prakarsa, Netherlands & Jakarta.

Butarbutar, Russel, 2017, *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional (P3B/Tax Treaty, Transfer Pricing, Tax Avoidance, Tax Evasino, Tax Amnesty)*, Gramata Publishing, Bekasi,

Butterworths, 1997, *Business and Law Dictionary*, Sydney.

Darussalam, Hutagaol, dan Septriadi, 2010, “Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional”, DANNY DARUSSALAM Tax Center.

Darussalam, Septriadi, Danny, 2017, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda : Panduan, Interpretasi dan Aplikasi*, DDTC (PT. Dimensi Internasional Tax), Jakarta.

Djarmiko, M. Hary, 2016, *Problematik Sengketa Pajak dalam Mekanisme Peradilan Pajak di Indonesia*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta Pusat.

Erna Widodo, dan Mukhtar, 2000, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Avyrouz, Yogyakarta.

Fidel, 2014, *TAX LAW : Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum*, PT. Carofin Media (Group Carofin Publishing, Anggota IKAPI), Tangerang

Glabush, Julie Rogers, 2015, “*The IBDF International Tax Glossary*”, *International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)*, Amsterdam.

Gunadi, 2013, *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan : Edisi 2013*, Penerbit Bee Media, Jakarta.

Hutagaol, John, 2000, *Pemahaman Praktik Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan Negara-negara di Kawasan Eropa*, Salemba Empat, Jakarta.

Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2015, *Modul Chartered Accountant : Manajemen Perpajakan*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

Maarten van't Riet, Arjan Lejour, 2020, *Dutch Tax Treaties and Developing Countries – A Network Analysis*, CBP Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Belanda.

Merks, Paulus, 2007, *Categorizing International Tax Planning*, *International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)*, Amsterdam.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2005, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Penerbit Lab. Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Pohan, Chairil Anwar, 2019, *Pedoman Lengkap Pajak Internasional : Konsep, Strategi dan Penerapan (Edisi Revisi)*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Resmi, Siti, 2019, *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 11 – Buku 1*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Simanjuntak, Timbul, 2019, *Perpajakan Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Suandy, E, 2013, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

2. Hasil Penelitian

Astari, Citra, 2018, *The Legal Construction of Shell Company in the Perspective of Indonesian Company Law (Case Study : Panama Papers)*, Skripsi,

Program Internasional Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Budijaya, William, 2016, *Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Special Purpose Vehicle (SPV) yang Berlaku dalam Beberapa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Darmawansyah, Fajar, 2019, *Pengaruh Political Connection dan Multinational Company terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderating (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.

Hurree-Gobin, Padma S., 2020, *Special Purpose Entities : Guidelines for a Data Template*, hasil penelitian, *International Monetary Fund*, Washington, D.C.

Martatilova, Luh Putu Adinda, 2009, *Kajian Normatif Yuridis Mengenai Peraturan Anti Penghindaran Pajak (Anti Avoidance Rule) Menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan di Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

OECD, 2001, *Behind the Corporate Veil : Using Corporate Entities for Illicit Purposes*, Hasil Penelitian, Organisation for Economic Co-operation and Development, France.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740). Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juncto Undang-undang Nomor

1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juncto Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994 tentang Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1983 Tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Pengajuan Keberatan, Dan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1986 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62)

Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23).

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan, efektif sejak 1 Januari 2004 (P3B Indonesia-Belanda)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 768/B/PK/PJK/2012 perihal Peninjauan Kembali perkara PT. Indah Kiat Pulp & Paper tbk, 25 Maret 2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 82/B/PK/PJK/2015 perihal Peninjauan Kembali perkara PT. Pembangunan Deltamas, 28 April 2015.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang

Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui *Special Purpose Vehicle* juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 /PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1439)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek, juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 Tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 702)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK/03/2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) Undang-

undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 258)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.03/2010 tentang Penetapan Wajib Pajak Sebagai Pihak yang Sebenarnya Melakukan Pembelian Saham atau AKtiva Perusahaan Melalui Pihak Lain atau Badan yang Dibentuk untuk Maksud Demikian (*Special Purpose Company*) yang Mempunyai Hubungan Istimewa dengan Pihak Lain dan Terdapat Ketidakwajaran Penetapan Harga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 386)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, 21 November 2018.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-kasus *Transfer Pricing* (Seri TP-1), 9 Maret 1993.

4. Jurnal

Akbar, Amrul, Suryanti, Nyulistiowati, Suryamah, Aam, “Hubungan dan Kedudukan Hukum atas *Special Purpose Vehicle* dalam Transaksi Pembiayaan Proyek”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6, No. 1, Juni 2022.

Dewi, Dyah A. S. "Penyelesaian Sengketa Pajak." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, vol. 5, no. 2, 2010.

Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L., “Long run Corporate Tax Avoidance”, *The Accounting Review*, Vol. 83, No.1, 2008.

Gorton, Gary B., and Souleles, Nicholas S., "Special purpose vehicles and securitization." *The risks of financial institutions*. University of Chicago Press, 2007.

Hidayah, Nurul. 2015. Pengaruh Perusahaan Keluarga, Multinational Company, dan Kepemilikan Institutional Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012). Jom FEKON, Vol. 2, No.2.

Inkiriwang, Kevin G, "Perspektif Hukum Terhadap Upaya Penghindaran Pajak oleh Suatu Badan Usaha", *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 4, Juni 2017.

Na'im, Ainun, "SPECIAL PURPOSE VEHICLE INSTITUTIONS : Their business Natured and Accounting Implications", *Gadjah Mada International Journal of Business*, Vol.8, No. 1, January-April 2006.

Marfuah dan A.P.N. Azizah. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)* Vol. 18, No. 2, Desember 2014.

Mulyani, Hani Sri, Prihartini, Endah, Sudirno. Dadang, "Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 20, No. 2, 2020

Oktavinanda, Pramudya A., "*Special Purpose Vehicle* dalam Tinjauan Hukum dan Ekonomi (*Special Purpose Vehicle in Law and Economics*

Perspective)”, dalam Journal of Indonesia Corruption Watch, ‘*Climate Change* :

Pertanggungjawaban Korporasi di Sektor Kehutanan’, Oktober 2013.

Rego, S, “Tax Avoidance of U.S. Multinational Corporations”,

Contemporary Accounting Research, Vol. 20, 2003.

Tansuria, Billy Ivan, “Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dan Pajak

Penghasilan yang Bersifat Final”, Journal of Business and Economics, Vol. 11,

No.2, Desember 2012.

1. Internet

Aditya T. Handoko Bwoga, “Tax Management vs Tax Planning”,

<http://ortax.org/ortax/?mod=is-sue&page=show&id=19&list=&q-&hlm=7>,

diakses 1 Oktober 2022.

Kerin, James, “A Look Behind Shell Corporations”,

[https://www.investopedia.com/financial-edge/0712/a-look-behind-shell-](https://www.investopedia.com/financial-edge/0712/a-look-behind-shell-corporations.aspx)

[corporations.aspx](https://www.investopedia.com/financial-edge/0712/a-look-behind-shell-corporations.aspx), diakses tanggal 1 Oktober 2022.